

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya pembangunan dapat dilihat sebagai upaya atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ekonomi, politik, sosial, budaya dan aspek kehidupan masyarakat lainnya telah membentuk mekanisme pembangunan. Pembangunan ekonomi, di sisi lain, adalah proses memperbaiki kondisi dan meningkatkan kualitas, menuju kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam wacana ekonomi pembangunan, pembangunan ekonomi identik dengan penciptaan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan nasional (Michel: 2006). Rakyat adalah kekayaan suatu negara. Tujuan pengembangan diri adalah untuk memperbaiki lingkungan agar manusia dapat berumur panjang, sehat dan produktif. Ini mungkin tampak sederhana, tetapi sering dilupakan oleh dorongan jangka pendek untuk mengumpulkan kekayaan dan uang. Sebagai pembangunan manusia, manusia bukanlah alat dari pembangunan, melainkan menempatkan posisi mereka sebagai wujud akhir dari pembangunan itu sendiri. Dalam suatu negara, sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam pembangunan negara. Dalam setiap pencapaian, terutama pembangunan ekonomi di mana kesejahteraan manusia merupakan esensial dalam ekonomi masyarakat. Dalam skala internasional dikenal tujuan pembangunan milenium (*MilleniumDevelopment Goals/MDG's*), yang disepakati oleh kepala negara

dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam KTT 2000. Tujuan MDG's tersebut antara lain, mengentaskan kemiskinan dan kelaparan berkepanjangan, mewujudkan pendidikan dasar universal, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat mortalitas anak, meningkatkan kesehatan orang tua khususnya para ibu, melawan dan memberantas HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjaga dan melindungi lingkungan dan mempromosikan kerja sama global untuk mencapai tujuan pembangunan manusia. Tujuan akhir dari pembangunan adalah agar rakyat sejahtera. Manusia tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga harus menjadi subjek pembangunan, serta memberikan pengaruh dan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu daerah, dan kemajuan suatu negara secara makro. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, yang paling umum adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan standar untuk mengukur kesejahteraan suatu wilayah atau negara berdasarkan tiga dimensi: harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*), rata-rata lama sekolah (*means years of schooling*) dan kemampuan daya beli (*Purchasing power parity*). Ketiga indikator tersebut akan saling mempengaruhi, tidak hanya itu, faktor lain seperti ketersediaan lapangan kerja juga ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah, sehingga IPM akan meningkat. Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (UNDP: 1996).

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa terciptanya kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari faktor ekonomi. Dimana Indonesia menjadi salah satu yang secara luas telah menggunakan langkah yang membangun dan befokus dalam kemajuan ekonommi. Tuman keng (2018) berpendapat bahwa adanya pembangunan yaitu untuk memajukan perekonomian suatu negara yang dapat diukur melalui indikator Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto (PDB/GNP). jadi, dalam hal ini manusia dapat dilihat sebagai input dalam proses pertumbuhan, bukan objek pertumbuhan ekonomi. Munculnya Indeks Pembangunan Manusia bukan berarti mengesampingkan peran PDB, tetapi bagaimana mengubah PDB menjadi pembangunan manusia. Pembangunan manusia, seperti yang didefinisikan oleh United Nations Development Programme, adalah proses peningkatan dan perluasan pilihan masyarakat. Dari sekian banyak pilihan, ada tiga yang dirasa sangatlah relevan: usia, pendidikan, dan taraf hidup yang layak. Pilihan lain yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung ketiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap hak individu.

Adapun dalam perspektif islam menjelaskan mengenai ipm yaitu salah satu komponennya pembentuk IPM dijelaskan dalam Qs. Al-mujadilah 11:

لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحَ فَاَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفَسَّحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا أَمَّنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
الْعِلْمَ أَوْتُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ أَمَّنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ فَاَنْشُرُوا أَنْشُرُوا قِيلَ وَإِذَا  
خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ُ دَرَجَاتٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan” ( Qs. Al-mujadilah ayat 11).

Menurut tafsir Ibnu Katsir dalam soleh (2016) “Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang telah mencapai berbagai tingkat ilmu. Allah tahu apa yang kamu lakukan. jangan percaya, jika salah satu dari Anda memberi ruang untuk saudaranya, apapun apakah dia datang atau pergi, dan kemudian dia pergi, mengurangi haknya, padahal, itu adalah pencapaian ketinggian dan martabat di mata Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakannya, bahkan dia akan membalasnya di kehidupan ini dan selanjutnya. Sesungguhnya barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, Allah akan meninggikan dan meninggikan namanya. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman: “Allah akan memuji orang-orang di antara kamu yang beriman dan orang-orang yang telah mencapai berbagai derajat ilmu”.



Sumber: BPS

### Gambar 1.1

Data IPM Indonesia tahun 2015-2019.

Seperti terlihat pada gambar di atas, IPM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari 69,55 di tahun 2015 menjadi 70,18 di tahun 2016 dan terus meningkat hingga 71,92 di tahun 2019, menurut data IPM Jawa Barat 2015-2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum tingkat IPM di Jawa Barat berbanding lurus dengan tingkat IPM secara nasional.

### Tabel 1.1

Perbandingan IPM per Provinsi di Pulau Jawa Pada Tahun 2015-2019

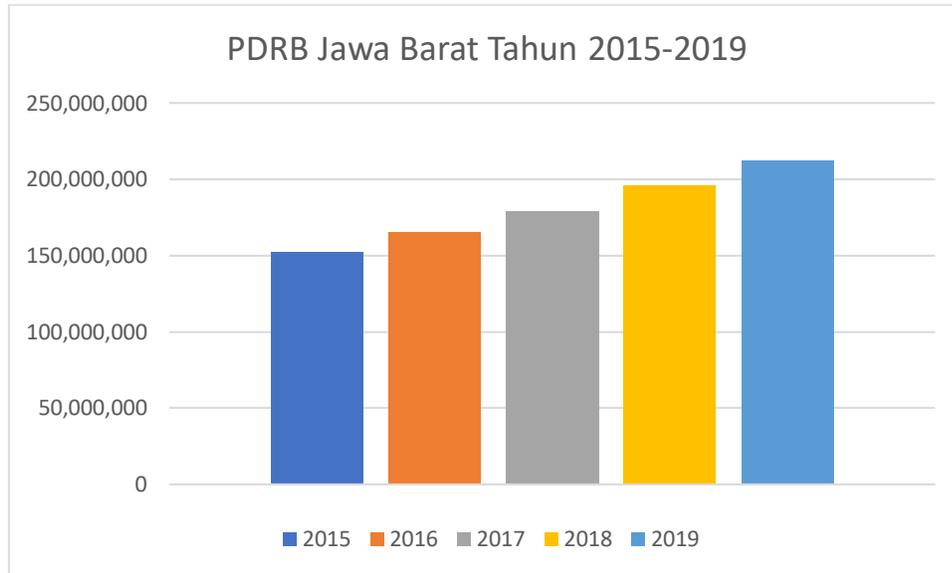
Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
D K I Jakarta	78.99	79.60	80.06	80.47	80.76
Jawa Barat	69.50	70.05	70.69	71.30	72.03
DIY	77.59	78.38	78.89	79.53	79.99

Jawa Timur	68.95	69.74	70.27	70.77	71.50
Jawa Tengah	69.49	69.98	70.52	71.12	71.73

Sumber: BPS

seperti terlihat pada tabel di atas, Jawa Barat menduduki peringkat ke empat dalam IPM pada tahun 2018 yaitu 71,30 dengan IPM tertinggi dipegang oleh DKI Jakarta. IPM Jawa Barat mendapati peningkatan secara bertahap selama kurun waktu 5 tahun 2015-2016, awalnya naik dari 69,50 pada tahun 2015 menjadi 70,05 pada tahun 2015 dan terus meningkat 72,03 pada tahun 2019. IPM merupakan salah satu alat untuk mengukur kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, yang terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan (Arsyad, 2014). tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan peningkatan produktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan tingkat pendapatan. Peningkatan pendapatan per kapita menjadi salah satu cerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yakni parameter untuk meninjau kinerja perekonomian, baik ditingkat nasional maupun regional (daerah). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu (Muliza dkk, 2017). Dengan ekonomi yang berkembang maka akan menjadikan seorang individu mendapatkan kualitas yang lebih baik.



Sumber: BPS Jawa Barat

### Gambar 1.2

Data Jumlah Produk Domestik Bruto Regional Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku 2015-2019

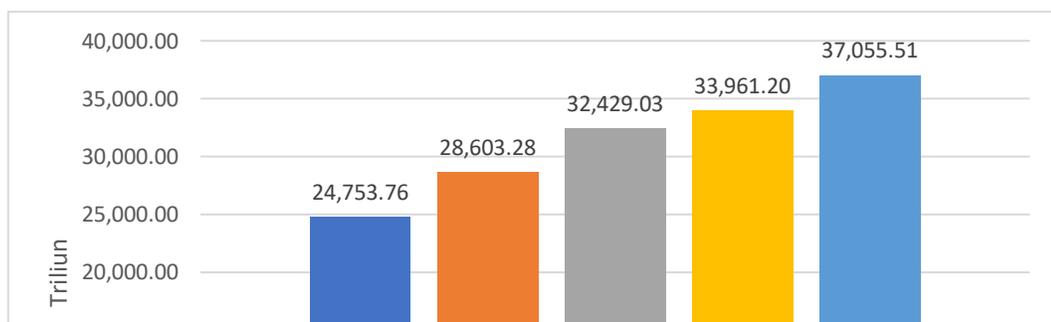
Berdasarkan gambar diatas, PDRB Jawa Barat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dimulai dari 2015 dengan jumlah PDRB Rp 1524 M hingga pada tahun 2019 menjadi Rp 2123 M. ini menjadi faktor dikarenakan kebutuhan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas suatu daerah semakin meningkat, dari situ lah pengusaha tepatnya para pelaku usaha akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang menjadi tujuan pembangunan. Kesehatan merupakan hal terpenting dalam kehidupan, sedangkan pendidikan merupakan aspek penting landasan bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga, dan keduanya penting untuk membentuk kapasitas manusia yang lebih luas

yang menjadi inti dari apa artinya berkembang (todaro, 2003). selama ini kita hanya menggunakan satu paramerter untuk mengkaji pertumbuhan ekonomi, yaitu Indeks Pertumbuhan Manusia, tetapi bukan indikator Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri. Hal ini dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang selama ini didominasi oleh pemerintah.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Karena sumber daya manusia akan berurusan dengan kekayaan alam, barang modal, dan investasi di sektor produktif seperti pabrik, mesin, peralatan, dll untuk menambah stok modal (capital stok). Untuk mengerjakan dan mengolah semua itu dibutuhkannya sumber daya manusia yang kompeten, terampil serta berpengalaman. Untuk mencapai semua itu kita harus melihat harapan lama sekolah yang di tempuh melalui sekolah-sekolah formal dan programprogram kerja, semua itu akan sia-sia kalau indeks harapan hidup yang melemah bisa diartikan masyarkat yang tidak sehat (pramonoe dan soesilowati, 2016).

Namun secara faktual tidak semua masyarakat dapat mendapatkan pendidikan, terdapat kalangan masyarakat yang tidak bisa memperoleh dan menuntaskan pendidikan di indonesia yaitu minimal 12 tahun. Maka dari itu pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan belanja pendidikan untuk memberikan bantuan sekaligus meningkatkan pendidikan.



Sumber: NPD Kemdikbud

**Gambar**

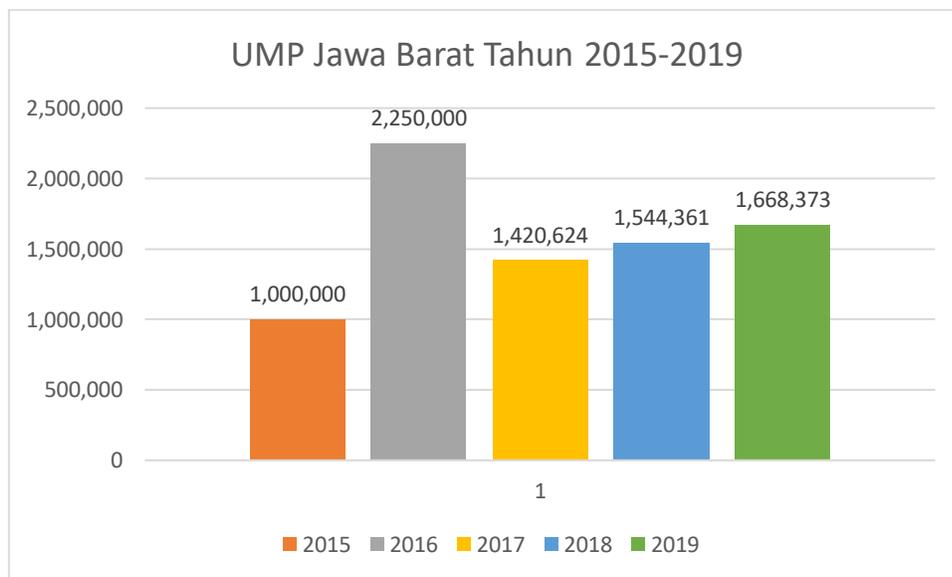
**1.3**

Data Belanja Pendidikan Jawa Barat 2015-2019.

Seperti terlihat pada gambar di atas, anggaran pendidikan setiap tahunnya semakin meningkat, dan anggaran yang dikeluarkan tidak hanya berasal dari PAD, tetapi juga dana transfer dari pemerintah pusat. Total anggaran pada tahun 2015 sebesar 24,753 triliun dan terus meningkat menjadi 37,055 triliun pada tahun 2019.

masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia adalah rendahnya kualitas pekerjaan karena berbagai alasan termasuk pendidikan. Hal ini juga tidak terlepas dari Upah Minimum Provinsi (UMP). upah minimum menjadi salah satu pengamatan sebagian investor yang ingin berinvestasi di suatu daerah, terutama bagi investor yang ingin membangun industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum provinsi suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ekonomi daerah tersebut (Bapedda 2010). kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang umumnya diterapkan di berbagai negara. Menurut Simanjutak (1992). dalam

Sulistiawati (2012), upah minimum merupakan suatu perlindungan bagi para pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak hanya mempertahankan nilai, namun juga sebagai proteksi agar para pekerja selalu produktif. Upah minimum menjadi dasar kebutuhan hidup layak akan kebutuhan dan pangan.



Sumber: BPS

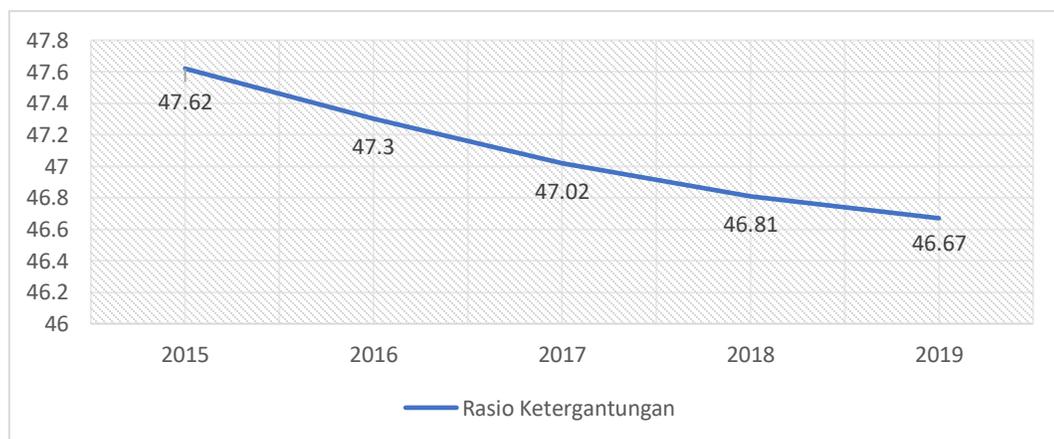
### Gambar 1.6

Data UMP Jawa Barat 2015-2019

Dari data diatas dapat kita lihat jumlah UMP Jawa Barat dari tahun 2015-2019 mengalami trend yang fluktuatif yaitu di tahun 2015 dengan gaji RP 1,000,000 kemudian tahun selanjutnya naik drastis hingga menjadi Rp 2,250,000 lalu turun Kembali pada tahun berikutnya dan kembali meningkat dengan jumlah RP 1,668,373 pada tahun 2019. Terdapat tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei

kebutuhan hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun, saat ini istilah UMR telah diganti dengan UMP dan UMK Dengan berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Adanya *life-Cycle Model* dari kebiasaan konsumsi dan menabung yang dikemukakan oleh Modigliani dan Brumberg (1954) serta Andana Modigliani (1963) dalam Bhakti, Istiqomah dkk (2012), mengasumsikan bahwa umur atau tahun menabung untuk menebusnya. Orang dilahirkan dengan kebutuhan hidup, dan rasio ketergantungan merupakan indikator demografis yang penting. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar kewajiban masyarakat produktif yang harus menanggung kehidupan masyarakat produktif dan tidak (Bhaktif, Istiqomah et al., 2012).



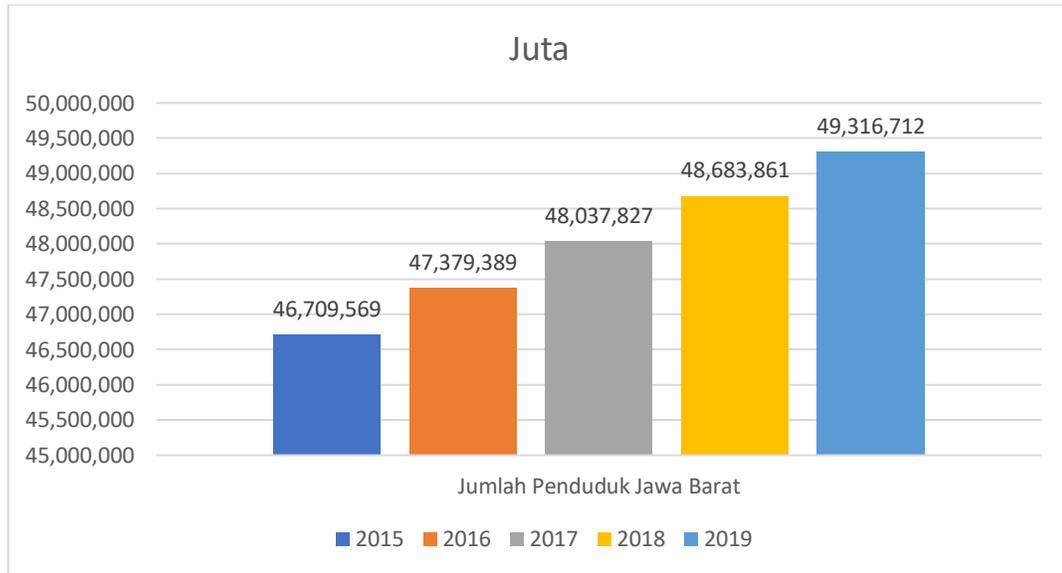
Sumber: BPS Jawa Barat

**Gambar 1.7**

Data Rasio Ketergantungan Jawa Barat tahun 2015-2019

Dari Gambar diatas kita bisa simpulkan bahwa rasio ketergantungan Jawa Barat memiliki trend menurun, dimulai dari 2015 dengan rasio ketergantungan poin 47.62 kemudian 2016 menjadi 47.30 dan seterusnya menurun hingga 2019 menjadi 46,67. Hal ini mengartikan bahwa beban ketergantungan dari penduduk turun dan beban penduduk usia produktif juga ikut berkurang (Pramono dan Soesilowati, 2016).

Manusia merupakan sumber daya yang penting bagi pembangunan ekonomi dan penduduk juga memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi. Secara umum, kemajuan populasi di negara berkembang tumbuh dengan sangat pesat. Persoalan tumbuhnya pembangunan berkaitan dengan jumlah penduduk dan sejahteranya seluruh masyarakat. Menurut Adam Smith (jasila, 2020), sifat proses pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output agregat dan pertumbuhan penduduk. Mengenai peran penduduk dalam pembangunan ekonomi, Smith percaya bahwa pembangunan kependudukan akan mendorong pembangunan ekonomi. Peningkatan populasi akan memperluas pasar, yang akan meningkatkan spesialisasi ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut.



Sumber: BPS Jabar

### Gambar 1.8

#### Data Jumlah Penduduk Jawa barat 2015-2019

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk di Jawa Barat setiap tahunnya meningkat mulai dari tahun 2015 dengan jumlah penduduk 46,7 juta, kemudian pada 2016 menjadi 47,3 juta hingga pada tahun 2019 menjadi 49.3 juta penduduk. Data tersebut juga akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia karena imigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya yang mana masyarakat sudah menjadi angkatan kerja dan siap kerja akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut (Jasasila, 2020). melonjaknya arus migrasi tentu berkaitan dengan pembangunan wilayah atau nasional juga masyarakat serta negara. Dengan imigran pembangunan terjadi karena kontribusi para imigran dan keahlian yang mereka bawa meningkatkan pendapatan.

Ke lima variabel di atas telah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Seperti yang dilakukan Maulana dan Bowo (2013) dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi nilai PDRB. Hasil penelitian ini positif dan memiliki implikasi penting bagi Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan pembangunan ekonomi termasuk peningkatan produktivitas di samping pendapatan nasional riil. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menunjukkan indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Yuliandi dan Wahyudin, 2013). Dengan indikator tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah berhubungan langsung dengan IPM, karena jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kualitas output individu meningkat.

Kahang dkk (2016) menggunakan variabel pendidikan sebagai variabel pengeluaran pendidikan, dan hasil penelitian ini positif dan signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pendidikan digunakan sebagai variabel independen untuk tambahan dan pendanaan pemerintah untuk sektor pendidikan, karena investasi di bidang pendidikan mutlak diperlukan. Pemerintah harus mampu membangun sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pemerintahan untuk dana pendidikan merupakan bentuk investasi khusus dalam meningkatkan produktivitas rakyat. Penegeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan memberikan pelayanan yang setara kepada penduduk Indonesia. Variabel selanjutnya yang digunakan oleh Chalid dan Yusuf (2015) adalah MSE yang Chalid dan Yusuf (2014), upah minimum merupakan salah satu

pertimbangan bagi investor yang ingin berinvestasi di suatu daerah, terutama yang ingin membangun pabrik atau industri yang menyerap tenaga kerja yang besar. Semakin tinggi standar upah minimum regional di suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat perekonomian daerah tersebut dan akan meningkatkan kualitas seseorang.

Variabel berikutnya adalah rasio ketergantungan Bhakti (2012). dengan hasil negatif signifikan Rasio ketergantungan yang rendah baik untuk pembangunan nasional jika disertai dengan peningkatan kualitas manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Pada variabel ini sejalan dengan tujuan utama pembangunan manusia, terlihat bahwa rasio ketergantungan berdampak pada indeks pembangunan manusia.

Kemudian Jasasila (2020) menggunakan variabel terakhir yaitu variabel demografi dengan hasil positif dan signifikan. Demografi berdampak pada IPM karena migrasi dari satu daerah ke daerah lain, dimana seseorang sudah kompeten dan matang dalam dunia kerja, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Meningkatnya arus migrasi akan berdampak bagi pembangunan daerah ataupun nasional serta bagi penduduk dan negara. Dengan adanya migrasi maka suatu pembangunan akan berkembang karena keterlibatan para pekerja yang berpengalaman serta ahli membuat pendapatan menjadi meningkat.

Dari jabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Upah Minimum, Rasio Ketergantungan dan Jumlah Penduduk Terhadap Ipm Di Kabupaten Kota Jawa Barat Tahun 2015-2019”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap IPM di Jawa Barat tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh belanja pendidikan pemerintah daerah terhadap IPM di Jawa Barat tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh UMK terhadap IPM di Jawa Barat tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh rasio ketergantungan terhadap IPM di Jawa Barat tahun 2015-2019?
5. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap IPM di Jawa Barat tahun 2015-2019?
6. Bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap IPM di Jawa Barat tahun 2015-2019?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap IPM di Jawa Barat tahun 2015-2019.
2. Untuk menganalisis belanja pendidikan pemerintah daerah terhadap IPM di Jawa Barat tahun 2015-2019.

3. Untuk menganalisis UMK terhadap IPM di Jawa Barat tahun 2015-2019.
4. Untuk menganalisis rasio ketergantungan terhadap IPM di Jawa Barat tahun 2015-2019.
5. Untuk menganalisis jumlah penduduk terhadap IPM di Jawa Barat tahun 2015-2019.
6. Untuk menganalisis keseluruhan variabel independen terhadap IPM di Jawa Bara tahun 2015-2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan dari pernyataan di atas, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak dan lembaga yang terkait dengan hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Di harapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan wawasan pengetahuan dan kajian ilmiah serta manfaat terkait dengan hal mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Pendidikan Pemerintah, UMK, Rasio Ketergantungan, dan Jumlah Penduduk terhadap IPM.
2. Sebagai referensi dan petunjuk bagi peneliti lain yang meneliti permasalahan serupa.